

ANALISIS MANAJEMEN KRISIS DI KAWASAN WISATA ALAM TELAGA NGEHEL PONOROGO

Deviona Ayu Larasati^{1*}, Joko Mijiarto¹

¹Program Studi Pariwisata, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Email: devionalrs@gmail.com¹, joko.mijiarto.par@upnjatim.ac.id²

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi risiko bencana alam seperti longsor dan cuaca ekstrem. Telaga Ngebel merupakan salah satu daya tarik yang memiliki tingkat kerentanan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan manajemen krisis bencana alam di kawasan wisata Telaga Ngebel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Telaga Ngebel, Ponorogo. Subjek penelitian meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai informan kunci, pengelola wisata sebagai informan utama, serta wisatawan sebagai informan pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen krisis belum optimal. Pada tahap prakrisis, belum tersedianya peta rawan bencana serta kurang efektifnya komunikasi risiko menunjukkan rendahnya kesiapsiagaan, meskipun jalur evakuasi sudah tersedia. Pada tahap krisis, koordinasi dan respons darurat berjalan cukup efektif sesuai standar operasional prosedur serta didukung oleh pelatihan simulasi. Pada tahap pascakrisis, evaluasi telah dilakukan, namun implementasinya masih memerlukan penguatan. Secara keseluruhan, manajemen krisis masih cenderung bersifat reaktif.

Kata kunci: Bencana alam; krisis; manajemen; mitigasi; pariwisata; risiko

ABSTRACT

Indonesia faces the potential risk of natural disasters such as landslides and extreme weather. Lake Ngebel is one of the attractions with this level of vulnerability. This study aims to analyze the preparedness of natural disaster crisis management in the Lake Ngebel tourist area. This study used a descriptive qualitative approach, with the research location at Lake Ngebel, Ponorogo. The research subjects included the Regional Disaster Management Agency as key informants, tourism managers as primary informants, and tourists as supporting informants. Data collection techniques included in-depth interviews, observation, and documentation, with data analysis involving data reduction, data presentation, and conclusion. The study's results indicate that crisis management is not optimal. In the pre-crisis phase, the unavailability of disaster hazard maps and ineffective risk communication indicate low preparedness, even though evacuation routes are available. In the crisis phase, coordination and emergency response were quite effective, in line with standard operating procedures and supported by simulation training. In the post-crisis phase, an evaluation has been conducted, but its implementation requires strengthening. Overall, crisis management still tends to be reactive.

Keywords: Crisis; management; mitigation; natural disaster; risk; tourism

History Article

Submitted 12 May 2026 | Revised 10 June 2026 | Accepted 13 June 2026

License and Copyright

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
International CC BY-NC-SA 4.0

4.0



Website

<https://journal.bukitpengharapan.ac.id/index.php/JUPARITA/index>

Email

juparita@bukitpengharapan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman destinasi wisata yang berpotensi menjadi daya tarik utama dalam menarik kunjungan wisatawan (Nugraha & Mawo, 2023). Kekayaan budaya serta keindahan alam tersebar di berbagai wilayah nusantara menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara maupun domestik (Safitri et al., 2024). Kondisi tersebut mendorong sektor pariwisata sebagai potensi unggulan yang dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan devisa negara (Chrestiana, 2020). Terlihat dari data Kementerian Pariwisata periode 2015-2024, setelah melewati masa pemulihan pascapandemi, sektor pariwisata ini menunjukkan akselerasi yang impresif, di mana perolehan devisa tahun 2024 diproyeksikan menyentuh angka US\$ 16,71 miliar, hampir menyamai rekor tertinggi pada tahun 2019 sebesar US\$ 16,91 miliar. Data ini memperkuat bahwa pariwisata merupakan kontributor utama dalam meningkatkan devisa negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan sektor pariwisata sebagai prioritas dalam pembangunan nasional sekaligus sebagai pilar utama perekonomian negara dinilai sangat relevan (Prakoso et al., 2024).

Berdasarkan pasal UU Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan, pariwisata diartikan sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Daya tarik wisata menjadi komponen penting dalam menunjang aktivitas kepariwisataan karena berperan sebagai faktor pendorong utama bagi kedatangan wisatawan (Prakoso et al., 2024).

Aktivitas pariwisata merupakan aktivitas perjalanan yang dilakukan secara individu maupun berkelompok menuju suatu destinasi tertentu dengan tujuan rekreasi, relaksasi, maupun memperoleh pengetahuan baru terkait objek wisata yang dikunjungi (Maulini & Andriyani, 2021). Namun demikian, aktivitas tersebut tidak terlepas dari potensi risiko yang dapat memengaruhi wisatawan maupun pihak terkait lainnya.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, baik dari aspek budaya maupun alam. Selain dikenal melalui Reog Ponorogo sebagai identitas budaya, wilayah ini juga memiliki daya tarik wisata alam unggulan, salah satunya Telaga Ngebel (Anggoro *et al.*, 2023). Keberadaan Telaga Ngebel tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan sektor pariwisata, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di sekitar (Niam et al., 2025).

Telaga Ngebel merupakan objek wisata alam yang terletak di kaki Gunung Wilis dengan ketinggian sekitar 750 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan berjarak kurang lebih 30 km dari pusat Kota Ponorogo (Maulini & Andriyani, 2021). Meskipun memiliki potensi wisata yang tinggi, kawasan ini juga memiliki tingkat kerentanan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, pohon tumbang, dan cuaca ekstrem, terutama pada musim hujan (Aolia et al., 2023). Kondisi geografis tersebut menuntut perencanaan yang matang dalam pengelolaan risiko bencana, termasuk penyediaan jalur evakuasi dan sistem mitigasi yang memadai.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kesiapan struktur mitigasi di kawasan Telaga Ngebel masih terbatas, seperti belum tersedianya jalur evakuasi yang jelas menuju titik kumpul saat terjadi bencana (Aolia et al., 2023). Hal ini menjadi perhatian serius mengingat kawasan tersebut berada di wilayah dengan curah hujan tinggi dan rentan terhadap longsor. Kejadian longsor pada 21 Juli 2025 yang mengakibatkan wisatawan luka semakin menegaskan bahwa kawasan ini membutuhkan sistem manajemen krisis yang lebih terstruktur dan lebih proaktif.

Penerapan manajemen krisis kepariwisataan yang efektif menjadi sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif serta menjaga keberlanjutan sektor pariwisata. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 yang menegaskan pentingnya manajemen krisis dalam menjaga citra pariwisata serta stabilitas kunjungan wisatawan.

Meskipun penelitian manajemen krisis pariwisata telah banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian yang secara khusus mengkaji kesiapan pengelola dalam menghadapi bencana alam di kawasan wisata Telaga Ngebel. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan manajemen krisis bencana alam oleh pengelola di

Kawasan Wisata Alam Telaga Ngebel, Ponorogo, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penguatan strategi mitigasi dan penanganan krisis guna menjamin keberlanjutan sektor pariwisata serta meminimalkan risiko yang ditimbulkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Krisis Pariwisata

Manajemen krisis merupakan proses pengelolaan untuk mencegah, menangani, dan memulihkan kondisi akibat krisis yang dapat mengganggu suatu organisasi atau kawasan wisata (Nurfauzi *et al.*, 2021). Keberadaan manajemen krisis dalam industri pariwisata muncul sebagai upaya untuk menghadapi kerentanan destinasi wisata terhadap perubahan lingkungan dan potensi bencana (Mochammad Arfani, 2022). Penerapan manajemen krisis dilakukan untuk mengurangi risiko penurunan citra destinasi yang dapat berdampak langsung pada tingkat kunjungan wisatawan.

2.2 Risiko Bencana Pariwisata

Risiko bencana dalam sektor pariwisata didefinisikan sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan oleh interaksi antara ancaman bahaya, kerentanan, dan kapasitas manajemen suatu destinasi (Harahap *et al.*, 2024). Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mitigasi bencana dapat dilakukan melalui penyediaan jalur evakuasi, sistem peringatan dini, serta edukasi kebencanaan bagi masyarakat dan wisatawan.

2.3 Tahapan Manajemen Krisis

Manajemen krisis tidak hanya dipahami sebagai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tetapi juga sebagai proses berkesinambungan yang terdiri atas beberapa tahapan yang saling berhubungan. Dalam pengelolaan kawasan wisata seperti Telaga Ngebel, pemahaman mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah krisis menjadi hal penting agar penanganan krisis dapat dilakukan secara efektif. Menurut (Coombs & Holladay, 2010) manajemen krisis dibagi menjadi tiga tahapan utama sebagai berikut:

2.3.1 Tahap Pra-Krisis

Tahap prakrisis merupakan fase persiapan dan pencegahan yang dilakukan sebelum krisis terjadi. Pada tahap ini, potensi dan tanda-tanda krisis mulai diidentifikasi sehingga pengelola dapat melakukan langkah mitigasi serta meningkatkan kesiapsiagaan (Nida *et al.*, 2022). Dalam kawasan wisata Telaga Ngebel, kegiatan yang dilakukan pada tahap prakrisis meliputi identifikasi daerah rawan bencana seperti titik longsor, penyediaan jalur evakuasi, pemasangan rambu peringatan, serta pelatihan mitigasi bagi kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Tahap ini bertujuan agar pengelola memiliki kesiapan dan perencanaan yang matang sehingga mampu melakukan penyelamatan wisatawan maupun fasilitas wisata secara cepat dan tepat apabila terjadi krisis.

2.3.2 Tahap Krisis

Tahap krisis dimulai ketika bencana atau situasi darurat benar-benar terjadi dan memerlukan penanganan yang cepat serta tepat. Fase ini menjadi tahap penting dalam manajemen krisis karena berfokus pada upaya penyelamatan dan penyampaian informasi kepada masyarakat (Widhara, 2023). Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini meliputi pengaktifan tim tanggap darurat, respons terhadap bencana, evakuasi dan penanganan

wisatawan, serta penyebaran informasi yang akurat. Tujuan utama tahap krisis adalah mengurangi jumlah korban jiwa, meminimalkan kerusakan fasilitas wisata, serta menjaga kondisi tetap terkendali.

2.3.3 Tahap Pasca-Krisis

Tahap pascakrisis dilakukan setelah kondisi darurat selesai dan situasi mulai stabil kembali (Nashihah, 2024). Pada tahap ini, perhatian difokuskan pada proses pemulihan serta evaluasi terhadap penanganan krisis yang telah dilakukan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi perbaikan fasilitas yang rusak, pembersihan kawasan wisata, serta promosi kembali untuk meyakinkan masyarakat bahwa Telaga Ngebel sudah aman untuk dikunjungi. Selain itu, pengelola juga perlu melakukan evaluasi dan mengambil pelajaran dari krisis sebelumnya agar kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang. Tahap ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas sistem manajemen krisis agar lebih siap menghadapi potensi bencana berikutnya.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kesiapan manajemen krisis bencana alam di Kawasan Wisata Alam Telaga Ngebel, Ponorogo. Pendekatan kualitatif ini mampu mengungkap fenomena secara mendalam dan kontekstual berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Wisata Telaga Ngebel yang terletak di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada bulan Februari hingga bulan Maret tahun 2026. Objek penelitian ini adalah kesiapan kepariwisataan yang dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu tahap prakrisis, tahap krisis, dan tahap pascakrisis yang mengacu pada konsep dari Coombs (2010), Delive (2007), dan Smudde (2001).

Subjek dalam penelitian ini ada tiga, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci adalah pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo yang memiliki otoritas serta pemahaman strategis terkait kebencanaan. Informan utama adalah pengelola Kawasan Wisata Telaga Ngebel yang berperan langsung dalam pengelolaan dan penanganan krisis. Adapun informan pendukung adalah wisatawan yang memberikan informasi tambahan terkait kondisi di lapangan.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang mencakup buku, artikel ilmiah, laporan resmi, serta dokumen yang relevan dengan manajemen krisis dalam bidang kepariwisataan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang didukung oleh pedoman wawancara, catatan lapangan, serta perangkat dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk mempermudah pemahaman tentang pola dan hubungan antartemuan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara sistematis guna menggambarkan tingkat kesiapan manajemen krisis di Kawasan Wisata Alam Telaga Ngebel, Ponorogo.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Kondisi Telaga Ngebel

Telaga Ngebel merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Ponorogo yang memiliki potensi wisata berbasis panorama alam pegunungan dan danau. Kawasan wisata ini terletak di lereng Gunung Wilis dengan karakteristik lingkungan berupa perbukitan, kawasan hutan, serta telaga alami yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Kondisi alam tersebut menjadikan Telaga Ngebel memiliki nilai strategis sebagai kawasan wisata berbasis alam sekaligus sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekitar yang bergantung pada sektor pariwisata.

Selain memiliki potensi wisata yang tinggi, Kawasan Telaga Ngebel juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang terkait dengan potensi bencana alam. Curah hujan yang tinggi, kondisi topografi yang berbukit, serta keberadaan lereng dengan tingkat kemiringan tertentu menyebabkan kawasan ini rentan terhadap bencana tanah longsor, pohon tumbang, dan cuaca ekstrem. Pada kondisi tertentu, peningkatan jumlah wisatawan saat masa libur panjang atau high season juga dapat meningkatkan risiko terjadinya krisis apabila bencana terjadi secara tiba-tiba di kawasan wisata.

Aktivitas wisata di kawasan Telaga Ngebel didukung oleh berbagai fasilitas penunjang, seperti area parkir, jalur wisata, pusat kuliner, penginapan, serta wahana rekreasi yang tersebar di sekitar telaga. Pengelolaan kawasan wisata melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, pengelola wisata, masyarakat setempat, dan berbagai instansi terkait untuk mendukung keamanan dan kenyamanan wisatawan. Selain itu, upaya mitigasi bencana juga mulai dilakukan melalui pemasangan rambu peringatan, jalur evakuasi, serta peningkatan koordinasi antarinstansi dalam menghadapi potensi krisis di kawasan wisata.

Sebagai destinasi wisata alam yang ramai dikunjungi wisatawan, Kawasan Telaga Ngebel memerlukan pengelolaan yang berorientasi pada aspek keselamatan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Oleh karena itu, penguatan manajemen krisis menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pariwisata sekaligus meminimalkan risiko bagi wisatawan maupun masyarakat di sekitar kawasan wisata.

4.1.2 Manajemen Krisis Bencana Alam

Manajemen krisis merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi, menangani, dan memulihkan dampak krisis agar kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Dalam konteks pariwisata, manajemen krisis menjadi aspek penting karena kawasan wisata rentan terhadap berbagai ancaman bencana alam yang dapat mengganggu keselamatan wisatawan serta keberlanjutan aktivitas pariwisata. Telaga Ngebel sebagai kawasan wisata alam memiliki potensi risiko bencana seperti tanah longsor, cuaca ekstrem, dan pohon tumbang, sehingga diperlukan pengelolaan krisis yang terencana dan terkoordinasi. Dalam penelitian ini, manajemen krisis bencana alam di Kawasan Wisata Telaga Ngebel dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu tahap prakrisis, tahap krisis, dan tahap pascakrisis. Tahap prakrisis berfokus pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan melalui mitigasi bencana dan pemasangan rambu peringatan, tahap krisis meliputi penanganan darurat seperti asesmen, evakuasi, dan koordinasi lintas instansi saat bencana terjadi, sedangkan tahap pascakrisis dilakukan melalui proses pemulihan kawasan wisata serta evaluasi penanganan bencana.

4.1.2.1 Tahap Pra Krisis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap prakrisis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ponorogo belum memiliki peta rawan bencana yang spesifik untuk kawasan wisata, termasuk kawasan wisata Telaga Ngebel. Temuan ini menunjukkan bahwa proses mitigasi risiko belum dilaksanakan secara menyeluruh, padahal pemetaan risiko merupakan komponen penting dalam manajemen krisis yang bersifat mitigatif.

Dalam perspektif teori manajemen krisis, tahap prakrisis menekankan pentingnya identifikasi risiko, perencanaan mitigasi, serta kesiapsiagaan. Ketiadaan peta rawan bencana dapat berdampak pada kurang optimalnya perencanaan evaluasi dan pengambilan keputusan saat terjadi bencana.

Pada tahap ini, manajemen krisis seharusnya memiliki instrumen identifikasi risiko yang akurat serta sistem komunikasi bencana yang dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Kondisi yang telah terpenuhi di Telaga Ngebel adalah ketersediaan sarana fisik mitigasi berupa rambu peringatan bahaya serta jalur evakuasi yang secara kuantitatif sudah memadai. Namun, terdapat aspek penting lainnya yang belum terpenuhi, yaitu ketiadaan peta rawan bencana yang spesifik di kawasan wisata dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ponorogo (BPBD), serta rendahnya pemahaman wisatawan mengenai lokasi titik kumpul. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur fisik telah tersedia, efektivitas mitigasi *non-structural* melalui edukasi resiko dan komunikasi risiko masih sangat lemah



Gambar 1. Rambu Rawan Bencana
sumber: Dokumentasi Penulis, 2026

Temuan ini memperlihatkan bahwa upaya mitigasi masih bersifat *struktural* (penyedia sarana), tetapi belum diimbangi dengan pendekatan *nonstruktural* berupa edukasi dan komunikasi yang efektif bagi wisatawan. Dengan demikian, tahap prakrisis di Telaga Ngebel masih belum optimal.

4.1.2.2 Tahap Krisis

Pada tahap krisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ponorogo dan Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo telah berjalan dengan baik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ponorogo secara langsung berkoordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo yang berada di lokasi untuk melakukan penanganan awal terhadap koordinasi darurat bencana.

Penanganan krisis dilakukan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo. Selain itu,

pelatihan simulasi evakuasi sebelumnya turut mendukung kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi situasi darurat, khususnya di Telaga Ngebel. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kesiapsiagaan dalam bentuk pelatihan memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas respons terhadap krisis. Keberadaan pos pengamanan bencana di kawasan wisata juga menjadi faktor pendukung dalam mempercepat respons terhadap bencana. Pos ini berfungsi sebagai pusat koordinasi dan penanganan awal, sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

Secara konseptual, fase krisis menekankan pentingnya respons yang cepat, akurat, serta didukung oleh koordinasi yang efektif. Idealnya, pada tahap krisis dibutuhkan respons yang cepat, akurat, dan didukung oleh koordinasi lintas sektor yang saling bekerja sama. Berdasarkan hasil wawancara, aspek yang sudah terpenuhi meliputi sinergitas yang efektif antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ponorogo (BPBD) dan Dinas Pariwisata di lokasi bencana serta penerapan penanganan darurat yang patuh pada *Standard Operating Procedure (SOP)*. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia juga telah teruji melalui simulasi evakuasi berkala yang didukung oleh keberadaan pos pengamanan bencana sebagai pusat pengendalian di lapangan.

Sampai saat ini, tidak teridentifikasi adanya kesenjangan yang signifikan, mengingat seluruh elemen respons tanggap darurat telah beroperasi sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penerapan manajemen krisis di kawasan Telaga Ngebel pada tahap krisis menunjukkan kinerja yang cukup optimal, khususnya dalam hal koordinasi antarlembaga serta pelaksanaan respons tanggap darurat.

4.1.2.3 Tahap Pasca Krisis

Pada tahap pascakrisis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo melakukan evaluasi terhadap penanganan bencana yang telah dilaksanakan. Kegiatan evaluasi ini diarahkan untuk menelaah efektivitas respons yang telah dilakukan di lapangan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan kekurangan yang muncul selama proses penanganan.



Gambar 2. Penanganan Saat Terjadi Krisis di Telaga Ngebel

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026

Secara konseptual, tahap pascakrisis memiliki peran strategis dalam siklus manajemen krisis karena tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi, tetapi juga pada upaya penyempurnaan sistem penanganan krisis. Melalui evaluasi yang sistematis, instansi terkait dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja penanganan bencana, sehingga dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan respons di masa mendatang.

Tahap pasca krisis ini idealnya berperan sebagai metode pembelajaran untuk memperbaiki sistem penanganan di masa depan melalui evaluasi yang mendalam. Pencapaian yang telah terealisasi meliputi koordinasi pascabencana dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi kendala teknis serta menilai efektivitas respons yang telah dijalankan. Namun demikian, aspek yang belum optimal terletak pada belum terintegrasinya hasil evaluasi tersebut ke dalam pembaruan kebijakan maupun dokumen perencanaan resmi dan mengikat. Tanpa tindak

lanjut yang jelas dalam penyempurnaan prosedur operasional, proses evaluasi berpotensi hanya menjadi kegiatan administratif belaka.

Tantangan utama pada tahap ini adalah mengoptimalkan hasil evaluasi agar dapat diimplementasikan sebagai sistem manajemen krisis yang lebih adaptif dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung keberlanjutan pariwisata di Telaga Ngebel.

4.2. Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa implementasi manajemen krisis di kawasan Telaga Ngebel dianalisis melalui tiga tahapan krisis sesuai dengan teori Coombs (2010) dan Smudde (2001). Pembahasan ini menelaah kesenjangan antara standar ideal manajemen krisis dan realitas implementasinya di lokasi penelitian.

4.2.1. Analisis Kesenjangan Tahap Pra Krisis

Tahap prakrisis dalam teori Coombs (2010) menekankan pentingnya pengenalan tanda-tanda krisis (*signal detection*) serta pencegahan. Di Telaga Ngebel, terdapat kesenjangan yang cukup kontras antara mitigasi fisik dan nonfisik. Secara fisik, pengelola telah memenuhi aspek kesiapsiagaan melalui penyediaan rambu bahaya dan jalur evakuasi. Namun secara nyata, tahap ini belum terpenuhi secara optimal karena ketiadaan peta rawan bencana yang spesifik untuk tempat wisata serta rendahnya literasi keselamatan wisatawan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hal ini disebabkan karena belum adanya integrasi kebijakan yang mendalam antara Badan Penanggulangan Bencana Ponorogo (BPBD) dengan pengelola wisata dalam merumuskan dokumen mitigasi yang bersifat *site specific*. Fokus pemerintah daerah selama ini masih tertuju pada mitigasi bencana di area permukiman, sehingga area wisata alam dengan karakteristik geologis yang unik, seperti Telaga Ngebel, belum mendapatkan perhatian khusus dalam pemetaan risiko secara terperinci. Selain itu, keterbatasan anggaran edukasi menyebabkan sosialisasi kepada wisatawan masih dianggap sebagai prioritas sekunder dibandingkan dengan pembangunan fisik, sehingga kesiapan prakrisis masih bersifat pasif.

4.2.2 Efektivitas Tahap Krisis

Tahap krisis ini berbeda dari tahap prakrisis. Manajemen yang diterapkan menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini sejalan dengan prinsip Smudde (2001) yang menekankan bahwa respons yang cepat dan tepat merupakan faktor kunci dalam meminimalkan dampak krisis. Pencapaian tersebut didukung oleh sinergi yang baik antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pariwisata melalui keberadaan pos pengamanan di kawasan wisata.

Efektivitas tersebut tidak terlepas dari adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas serta pelaksanaan simulasi secara rutin oleh petugas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelola memiliki tingkat responsivitas yang tinggi dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, pemanfaatan fasilitas darurat serta pengaturan arus pengunjung selama krisis mencerminkan bahwa aspek keselamatan publik telah menjadi prioritas utama sebagaimana ditekankan dalam konsep manajemen krisis pariwisata.

4.2.3 Evaluasi Tahap Pasca Krisis

Tahap pascakrisis menurut Coombs (2010) tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga mencakup evaluasi strategis. Di Telaga Ngebel, upaya pemulihan kawasan telah terlaksana dengan baik, terlihat dari kegiatan normalisasi jalur serta perbaikan fasilitas pascabencana. Selain itu, evaluasi antarinstitusi juga dilakukan secara berkala. Namun demikian, tahap ini belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek pembelajaran organisasi.

Kondisi tersebut disebabkan oleh pelaksanaan evaluasi yang selama ini masih bersifat koordinatif dan berorientasi pada penanganan dampak jangka pendek, sehingga belum terintegrasi ke dalam dokumen kebijakan formal yang mampu mendorong perubahan prosedur operasional secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen krisis di Telaga Ngebel

masih berada pada tahap transisi dari pendekatan yang reaktif menuju pendekatan yang lebih adaptif. Oleh karena itu, penguatan pada tahap pasca krisis menjadi sangat penting agar setiap peristiwa krisis dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pada tahap pra krisis di masa mendatang

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen krisis bencana alam di kawasan Telaga Ngebel, Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen krisis belum berjalan secara optimal dan seimbang pada setiap tahapan. Pada tahap prakrisis, kesiapsiagaan masih tergolong rendah, ditandai dengan belum tersedianya peta rawan bencana yang spesifik serta belum optimalnya penyampaian informasi terkait jalur evakuasi dan titik kumpul kepada wisatawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi masih belum dilakukan secara komprehensif dan cenderung terbatas pada aspek fisik tanpa diimbangi dengan komunikasi risiko yang efektif.

Sebaliknya, pada tahap krisis, koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo telah berjalan dengan baik. Respons penanganan darurat dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan standar operasional prosedur, serta didukung oleh pelatihan simulasi evakuasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas respons kelembagaan dalam menghadapi situasi krisis sudah memadai.

Pada tahap pascakrisis, kedua instansi terkait telah melakukan evaluasi terhadap penanganan bencana sebagai bentuk pembelajaran dan upaya perbaikan ke depan. Namun demikian, efektivitas tahap ini sangat bergantung pada implementasi hasil evaluasi dalam bentuk kebijakan maupun tindakan nyata yang berkelanjutan.

Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa manajemen krisis di kawasan Telaga Ngebel masih cenderung bersifat reaktif, dengan kekuatan pada tahap respons dan evaluasi, namun memiliki kelemahan signifikan pada tahap prakrisis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek kesiapsiagaan melalui penyusunan peta rawan bencana yang spesifik, peningkatan efektivitas komunikasi risiko kepada wisatawan, serta optimalisasi fungsi jalur evakuasi dan titik kumpul.

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya integrasi antara pendekatan struktural dan non-struktural dalam manajemen krisis, khususnya pada sektor pariwisata berbasis alam. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan agar pihak terkait meningkatkan edukasi kebencanaan bagi wisatawan serta memperkuat koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas komunikasi risiko kepada wisatawan secara lebih mendalam, serta mengembangkan model manajemen krisis berbasis partisipasi masyarakat dan wisatawan guna meningkatkan kesiapsiagaan secara menyeluruh.

6. REFERENSI

- Aolia, N. F., Nurdiansyah, T., Kumala, C. F., & ... (2023). Pengembangan Kawasan Ngebel dengan Pemetaan Obyek Wisata dan Rencana Mitigasi Bencana. *VILLAGE: Journal ...*, 3(1), 27–31. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/village/article/view/10125%0Ahttps://journal.umpo.ac.id/index.php/village/article/download/10125/3227>
- Chrestiana, A. (2020). Kontribusi Sektor Pariwisata Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(05), 1–8.
- Coombs, W. T., & Holladay, S. J. (2010). The Handbook of Crisis Communication. *The Handbook of Crisis Communication*, 1–561. <https://doi.org/10.1002/9781119678953>
- Harahap., dkk. J., Teknik, F., Politeknik, E., Medan, N., Besar, B., Mutu, P., Teknik, F., & Darma, U. (2024). Jurnal Darma Agung. *Jurnal Darma Agung*, (April), 483–493.
- Maulini, U., & Andriyani, D. (2021). ASPEK-ASPEK YANG MEMPENGARUHI JUMLAH

- KUNJUNGAN Keywords : Travel Distance , Travel Costs , Age , Income This study aims to analyze the factors that influence the number of tourist visits at Pangah Gandapura Beach . The data used in this study are primary. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 04, 37–46.
- Mochammad Arfani. (2022). *KOLABORASI PENTAHILIX DALAM UPAYAPENGURANGAN RISIKO BENCANA PADA DESTINASI WISATA DI DESA KALANGANYAR SIDOARJO* Mochammad Arfani Universitas Dr. Soetomo, Jawa Timur, Indonesia Email: yaluhur@yahoo.com INFO ARTIKELABSTRAK Diterima 28 November 2021 Direvisi 15 Desember. 3(1), 306–312.
- Nashihah, S. D. (2024). *MEMBANGUN RESILIENSI ORGANISASI SEBAGAI STRATEGI EFEKTIF DALAM MANAJEMEN KRISIS*. (December).
- Niam, M., Qonia'ah, Alfiyani, L., & Putri, D. (2025). Implikasi Modal Sosial dalam Community Based Tourism (CBT) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kawasan Wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Socius: Jurnal of Sociology Research ad Education*, 12(2), 152–165.
- Nida, H. S., Sukana, M., & Narottama, N. (2022). Manajemen Krisis di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung Pasca Tsunami Selat Sunda tahun 2018. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 10(1), 19. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2022.v10.i01.p03>
- Nugraha, R. N., & Mawo, M. L. (2023). Daya Tarik Wisata Taman Ismail Marzuki Dalam Meningkatkan Minat Berkunjung. *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, 6(1), 236–240. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i1.57955>
- Nurfauzi, E., Annisarizki, A., & Mardiana, S. (2021). Manajemen Krisis Satgas Penanggulangan Bencana PT. Banten Wet Java Tourism Development. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 2(2), 76–95. <https://doi.org/10.36256/ijtl.v2i2.157>
- Prakoso, H. A., Anwar, V. A., & Malasari. (2024). Relevansi Ide Poin SDG's dan GNH Dalam Implementasi Pembangunan Sosial-Ekonomi yang Adil Melalui Sektor Pariwisata di Bhutan. *Jurnal Partisipatoris*, 6(1), 73–92. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalpartisipatoris/article/download/39009/15890>
- Safitri, H. M., Kumala, D., & Faisal, D. M. (2024). Pemanfaatan Cagar Budaya dan Keindahan Alam Desa Anoi Itam-Sabang sebagai Daya Tarik Wisatawan. *Ambacang ...*, 1(1), 10–19. <https://journal-ambacang.willyprint-art.my.id/index.php/ojs/article/view/5>
- Widhara, S. S. (2023). Manajemen Krisis Public Relations Polda Jabar Dalam Membangun Citra Positif Melalui Media Massa. *Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJDPR)*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.25124/ijdpr.v2i1.6438>